

240 501

25 NOV 2019

28 NOV 2019



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 3667/KP.02.01/XI/2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Seleksi Terbuka JPT Pratama
di lingkungan Ombudsman RI

20 November 2019

Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Para Kepala LPNK / LNS
3. Para Gubernur

di

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat di lingkungan instansi Bapak/Ibu untuk mengikuti seleksi terbuka. Adapun jabatan yang akan diisi adalah JPT Pratama Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Ketentuan, persyaratan, dan tahapan seleksi dapat dilihat dalam pengumuman terlampir, atau melalui website www.ombudsman.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E

Daftar Instansi Penerima Surat

Kementerian Negara:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan Indonesia
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Perindustrian
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
13. Kementerian Ketenagakerjaan
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Kementerian Kesehatan
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kementerian Sosial
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Komunikasi dan Informatika
20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
22. Kementerian Sekretariat Negara
23. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
26. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
27. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
28. Kementerian Pemuda dan Olahraga
29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
30. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
31. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
32. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
33. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Daftar Instansi Penerima Surat

Lembaga Non Kementerian dan Lembaga Non Struktural:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Informasi Geospasial
3. Badan Intelijen Negara
4. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
5. Badan Kepegawaian Negara
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
9. Badan Narkotika Nasional
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
13. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
17. Badan Pertanahan Nasional
18. Badan SAR Nasional
19. Badan Standardisasi Nasional
20. Badan Tenaga Nuklir Nasional
21. Lembaga Administrasi Negara
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Lembaga Ketahanan Nasional
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
26. Lembaga Sandi Negara
27. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
28. Komisi Aparatur Sipil Negara
29. Komisi Informasi
30. Komisi Kejaksaan
31. Komisi Kepolisian Nasional
32. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
33. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
34. Komisi Pemberantasan Korupsi
35. Komisi Pemilihan Umum
36. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
37. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
38. Komisi Penyiaran Indonesia
39. Komisi Penyuluhan Nasional
40. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Daftar Instansi Penerima Surat

Gubernur:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Banten
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara
25. Provinsi Sulawesi Utara
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Sulawesi Selatan
30. Provinsi Gorontalo
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua Barat
34. Provinsi Papua



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR 3 TAHUN 2019

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kepala Biro SDM dan Umum (Eselon II.a) di Lingkungan Ombudsman RI, dengan kelentuan sebagai berikut :

A. Jabatan yang akan diisi

- Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (Eselon II.a)

B. Persyaratan Administrasi

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 1 April 2020;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2017 dan tahun 2018);
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2017 dan Tahun 2018;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan

C. Lamaran dan Kelengkapan Dokumen

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran yang ditandatangani pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email;
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana, serta hukuman disiplin tingkat sedang, atau tingkat berat yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik dan bermeterai Rp. 6.000,-;
6. Pakta Integritas yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-;
7. Fotokopi Ijazah S-1 (S-2 dan/atau S-3 jika ada);
8. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir min. Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Jabatan Terakhir;
10. Fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2017 dan Tahun 2018;
12. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - b. Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis; dan
 - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
13. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
14. Fotokopi NPWP;
15. Fotokopi bukti penyerahan SPT Tahun 2017 dan Tahun 2018;
16. Fotokopi laporan penyerahan LHKASN/LHKPN;
17. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

D. Pendaftaran

Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 7 November s.d 29 November 2019 pada laman Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

1. Pelamar mengirimkan lamaran beserta dokumen kelengkapannya mulai tanggal 7 November 2019 Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 November 2019 pukul 16.00 WIB yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat :

**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
email : panseljpt@ombudsman.go.id Telp : 021-52960907

Softcopy lamaran dan dokumen kelengkapan dikirimkan melalui email panseljpt@ombudsman.go.id

2. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
3. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan langsung kepada peserta yang lulus tahapan seleksi dan/atau melalui website Ombudsman

E. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman pendaftaran	7 November 2019
2.	Peherimaan lamaran	7 – 29 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	3 Desember 2019
4.	Ujian Makalah	9 Desember 2019
5.	Pengumuman hasil ujian makalah	10 Desember 2019
6.	Assessment	22 – 23 Januari 2020 (tentative)
7.	Presentasi dan wawancara akhir	7 Februari 2020
8.	Pengumuman hasil akhir seleksi	20 Februari 2020

F. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
 - a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
2. Seleksi Pembuatan Makalah.
 - a. Pembuatan makalah dan paparan dilaksanakan di Gedung Ombudsman RI;
 - b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di website Ombudsman.
3. Assessment Center.
 - a. Penilaian menggunakan metode *Assessment Center* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Selanjutnya panitia menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi Asesmen, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Seleksi Wawancara dan Presentasi.
 - a. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan presentasi terhadap peserta yang lulus seleksi pembuatan makalah, dan dapat mengundang user sesuai jabatan;
 - b. Selanjutnya ketua pansel menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dengan tahapan seleksi dan/atau melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

G. Deskripsi Tugas Jabatan

1. Kepala Biro SDM dan Umum

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan layanan pengadaan;
- c. Pengelolaan barang milik negara dan aset;
- d. Pengelolaan tata usaha dan keprotokolan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia dan layanan umum;
- f. Pelaksanaan administrasi Biro.

H. Ketentuan Lain-lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.

Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui website Ombudsman RI www.ombudsman.go.id untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses website dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 7 November 2019
Ketua Panitia Seleksi

Alvin Lie Ling Piao, M.Si